



IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG KESEHATAN

(Studi Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Sumbersekar
Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

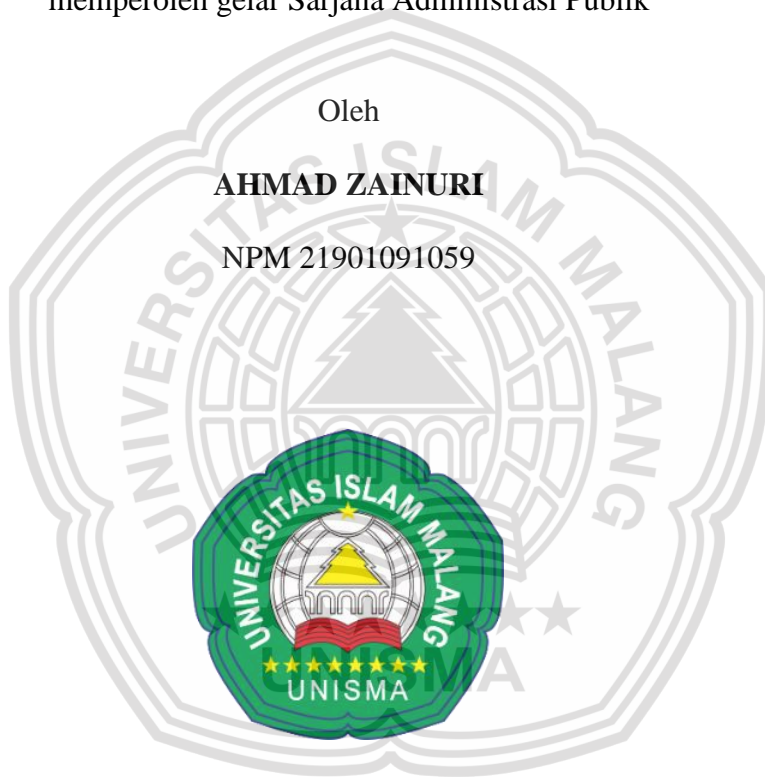
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

AHMAD ZAINURI

NPM 21901091059



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2023

RINGKASAN

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan asupan gizi pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sehingga menyebabkan perkembangan otak anak menurun dan tinggi badannya pendek tidak sesuai dengan ukuran anak seusianya. Dalam hal ini perlu perbaikann gizi di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 yang bertujuan untuk kesehatan ibu, bayi dan balita serta memuat strategi pemerdayaan masyarakat bidang kesehatan. Sehingga strategi tersebut perlu diimplementasikan agar pemberdayaan masyarakat bisa efektif. Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang termasuk desa yang masih terdapat kasus stunting berdasarkan temuan penelitian terdahulu pada tahun 2021 yaitu terdapat 5 dari 16 balita dalam kondisi stunting yang ditemukan di Dusun Precet.

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kasus stunting di Desa Sumbersekar. Bagaimanan strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar. Bagaimana implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stuntingnya. Kemudian bagaimana efektivitas implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting.

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk mencari data dan mendiskripsikanya dengan teknik analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) serta keabsahan datanya menggunakan kredibilitas yaitu, perpanjangan pengamatan, tringulasi sumber, serta analisi negatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stunting di desa sumbersekar sudah rendah tingkat prevelensi 13,01% dibawah target nasional penurunan stunting pada 2024 yaitu 14%. Faktor penyebabnya yaitu asupan gizi serta ada hubungannya dengan kondisi masyarakat yang kurang mampu. Desa Sumbersekar strategi yang diambil sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019, yaitu 1). peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan mengatasi masalah stunting, 2). Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pergerakan masyarakat, 3). Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat, 4). Penguatan dan Peningkatan advokasi, 5). Meningkatkan kemitraan, 6). Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal, 7). Pengintegrasian program tau kegiatan sesuai kesepakatan dan kebutuhan. Strategi pemberdayaan bidang kesehatan tersebut sudah diimplementasikan dengan baik sehingga menunjukkan keberhasilannya yaitu adanya kesadaran masyarakat ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anaknya serta mampu berpartisipasi baik secara fisik maupun materi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan dau Kabupaten Malang.

Kata Kunci: *Implementasi, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Stunting*

SUMMARY

Stunting is a condition of failure to grow in children due to lack of nutritional intake in the first 1000 days of life, causing the child's brain development to decrease and their height is not in accordance with the size of children their age. In this case, it is necessary to improve nutrition in the community. Therefore, the government made a policy of community empowerment in the health sector through Minister of Health Regulation Number 8 of 2019 which aims to improve the health of mothers, infants and toddlers and contains strategies for community empowerment in the health sector. So that these strategies need to be implemented so that community empowerment can be effective. Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency is a village where there are still cases of stunting based on the findings of previous research in 2021, namely there are 5 out of 16 toddlers in a stunting condition found in Precet Hamlet.

The purpose of this study is to find out and describe how stunting cases in Sumbersekar Village. How is the community empowerment strategy in the health sector in an effort to prevent stunting in Sumbersekar Village. How is the implementation of community empowerment strategies in the health sector in its stunting prevention efforts. Then how is the effectiveness of the implementation of community empowerment strategies in the health sector in an effort to prevent stunting.

In this study, the methodology used is a case study with a qualitative approach to find data and describe it with interactive model data analysis techniques initiated by Miles, Huberman and Saldana (2014) and the validity of the data using credibility, namely, extension of observation, source triangulation, and negative analysis.

The results of this study indicate that stunting in Sumbersekar village has a low prevalence rate of 13.01% below the national target of reducing stunting by 2024 which is 14%. The causative factor is nutritional intake and has to do with the condition of the underprivileged community. The strategy taken by Sumbersekar Village is in accordance with the Minister of Health Regulation Number 8 of 2019, namely 1). increasing community knowledge and ability to recognize and overcome stunting problems, 2). Increasing public awareness through community movements, 3). Community development and organization, 4). Strengthening and improving advocacy, 5). Improving partnerships, 6). Increasing the utilization of local wisdom-based potential and resources, 7). Integration of programs and activities according to agreements and needs. The health sector empowerment strategy has been implemented well so that it shows its success, namely the awareness of the community to the posyandu to monitor the growth and development of their children and being able to participate both physically and materially in community empowerment in the health sector in an effort to prevent stunting in Sumbersekar Village, Dau District, Malang Regency.

Keywords: Implementation, Community Empowerment Strategy, Health, Stunting

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dari itu perlu adanya sebuah pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Banyak alasan atau sebab dari sebuah kesejahteraan, namun hal yang paling utama dan mendasar yang membuat masyarakat sejahtera adalah sebuah kesehatan. *United Nations Development Program*, UNDP (2004) dalam Sulaeman (2020:2) mengilustrasikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai sebuah acuan kesejahteraan sebuah negara yang dimana indikator pembangunannya yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga indikator tersebut seperti siklus yang akan selalu saling mempengaruhi selama berjalannya kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pentingnya sebuah kesehatan tidak perlu diperdebatkan lagi, karena itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka dari itu perlu sebuah pembangunan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Menjadi sebuah negara dengan pembangunan kesehatan yang baik itu menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia, melihat kondisi negara yang masih berkembang. Salah satu masalah kesehatan di Indonesia adalah stunting. Salah satu kondisi yang disebabkan oleh masalah gizi, kondisi tersebut juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan stunting turun hingga 14% pada tahun 2024. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 sebesar 24,4%. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan prevelensi stunting harus dibawah 20%. Dengan demikian masalah stunting ini seharusnya menjadi perhatian serius dan mendesak yang harus ditangani pemerintah. Dalam percepatan penurunan stunting pemerintah menggunakan pendekatan promotif dan preventif karena menyangkut kesehatan nasional (Stunting.go.id, 2022)

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi pada bayi di 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang berlangsung lama sehingga menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena kekurangan gizi balita stunting akan tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita umurnya. Namun perlu diperhatikan bahwasanya bertubuh pendek belum tentu stunting, tapi stunting itu pasti bertubuh pendek. Stunting menjadi masalah yang sangat penting

untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia di Indonesia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan serta akan menyebabkan kematian anak. (BKKBN, 2021)

Dampak yang di sebutkan di atas merupakan dampak pada kesehatan, adapun dampak pada perekonomian negara ternyata dalam jangka panjang menimbulkan kerugian sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika tahun 2016 berdasarkan data Bank Dunia PDB Indonesia sebesar Rp 13.000 triliun maka potensi kerugian yang ditimbulkan oleh stunting dapat mencapai Rp260-390 triliun per tahun. Karena ketika dewasa anak yang mengalami stunting berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dari pada anak yang tidak mengalami stunting. (Tempo.co, 2018)

Masalah stunting di Indonesia merupakan salah satu kondisi yang menjadi salah satu dari masih rendahnya kualitas pembangunan kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani masalah kesehatan tersebut salah satunya yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dua diantaranya meliputi; kesehatan ibu, bayi dan balita kemudian perbaikan gizi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi dalam upaya pencegahan stunting khususnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Mengapa demikian karena terkait upaya pencegahan stunting dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam pasal 6 di sebutkan lima pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan

stunting salah satunya dengan peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangun daya dan membuat menjadi lebih berdaya dalam sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kekuasaan sehingga terbangun kemandirian dan partisipasi aktif. Sehingga dalam hal ini pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan dengan memberi sesuatu melainkan dengan memotivasi, mendorong dan membangkitkan kesadaran dan keberadaan (eksistensi diri) dan menciptakan iklim yang kondusif dengan potensi yang dimilikinya. Sulaeman (2020: 118). Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan memberikan dampak positif terhadap pembangunan untuk menuju kesejahteraan dalam masyarakat.

Menurut Sulaeman (2020: 176) pengertian pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan mengandung aspek upaya (*effort*), optimalisasi potensi masyarakat menggali potensi masyarakat, kemitraan (*partnership*), peningkatan, pertumbuhan (*growth*), pembangunan (*development*), pengembangan sumberdaya manusia sukarela (Kader), regulasi, kemandirian, dan keberlanjutan (*sustainability*). Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagai proses pemberian informasi kepada individu, keluarga, kelompok secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah menjadi sadar (berpengetahuan atau *knowledge*), sehingga ketika sadar mereka menjadi mau (aspek sikap dan *attitude*) dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek tindakan atau *practice*). Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan merupakan suatu

proses aktif, dimana dalam kegiatan dan program kesehatan masyarakat yang diberdayakan harus berperan aktif (partisipatif).

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yang selanjutnya disebut pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat.

Dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pemerintah telah menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan diantaranya; 1). Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi; 2). Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pergerakan masyarakat; 3). Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat; 4). Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan; 5). Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta. 6). Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; 7). Pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat;

Strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di harapkan mampu mencegah terjadinya stunting pada bayi dalam masa 1000 HPK. Periode 1000 hari pertama sering disebut *Window of opportunities* atau periode emas ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa janin sampai anak usia dua tahun terjadi proses tumbuh-kembang yang sangat cepat dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Gagal tumbuh pada periode ini akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan pada usia dewasa. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan masalah stunting ini mengingat tingginya prevalensi stunting Indonesia. Rahayu, dkk (2018: 116).

Dalam rentang waktu tersebut perlu adanya intervensi gizi yang baik baik secara spesifik dan intervensi gizi sensitif. Maka dari itu optimalisasi pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan harus menjadi perhatian dari berbagai elemen masyarakat, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dari lintas sektor yang berkaitan. Artinya strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ini harus diimplementasikan dengan baik agar berdampak pada pencegahan stunting.

Implementasi merupakan usaha tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sebuah langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagaimana dikatakan Van Meter dan Varn Horn (Anggara 2014: 240) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atas swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Lester dan Stewart memaknai implementasi yakni pelaksanaan undang-undang dimana

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan sebuah kebijakan atau program-program (Budi Winarno, 2014: 147)

Kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dibuat untuk menjadi acuan bagi setiap pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan bagian wewenang pemerintah daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sudah menjadi wewenang dan harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini kabupaten Malang sebagai daerah yang pernah menjadi daerah dengan prevalensi tingkat kasus stunting sebesar 20% pada tahun 2019 yang perlahan mulai membaik dan bahkan sampai tingkat prevalensi 8,1%. Namun pemerintah kabupaten Malang berkomitmen di tahun 2023 dapat menurunkan stunting sampai angka 0% (*Zero Stunting*) papar Bupati Malang. (radarmalang.jawapos.com, 2022)

Tentu komitmen ini perlu diapresiasi, namun untuk mencapai target itu harus ada langkah-langkah yang strategis, kerja sama lintas sektor serta memaksimalkan peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan stunting. Mengingat stunting ini bukan masalah yang dapat selesai dalam waktu tertentu, mungkin tahun ini 0% atau tidak ada kasus sama sekali bagaimana dengan tahun depan dan tahun berikutnya oleh karena itu pencegahan perlu untuk menjaga

kasus stunting tetap pada kondisi tertangani, upaya pencegahan bisa dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengatakan bahwa penurunan angka stunting di kabupaten Malang merupakan hasil kerja sama berbagai elemen yang ada, semua pihak ikut terlibat, profesi, perguruan tinggi, lintas sektor serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bekerja membantu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adanya data yang benar dari setiap desa akan membantu penanganan stunting dengan baik. Kemudian sesuai dengan harapan Bupati Malang di tahun 2023 untuk mencapai 0% (*zero stunting*), Dinas Kesehatan Kabupaten Malang merasa hal tersebut sulit tercapai. (Dinkes.malangkab.go.id, 2022)

Menurut Mursyidah Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga menyampaikan, angka stunting bisa mencapai 0%, jika terdapat perubahan perilaku dari semua lini. “Kalau 0% itu sulit, karena kita harus melakukan perubahan perilaku. Kita pernah melakukan penelitian, ternyata hasilnya bahwa stunting ini berasal dari perilaku keluarga,” (Dinkes.malangkab.go.id, 2022)

Sejak tahun 2018 Kabupaten Malang telah mengeluarkan kebijakan Upaya Pencegahan Stunting yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa upaya pencegahan stunting terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Upaya pencegahan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan melibatkan semua unsur pemerintahan daerah, pemerintahan desa, swasta dan masyarakat.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 78 bahwasanya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Artinya pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari model pembangunan desa. Sehingga dalam pembangunan kesehatan pemerintah desa harus menjadi garda terdepan dalam menangani masalah kesehatan di masyarakatnya.

Adapun dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang, pemerintah desa harus benar-benar fokus dan memperhatikan perkembangan stunting di desanya. Pemerintah desa bisa bekerja sama dengan berbagai elemen, lintas sektor. Selalu melihat dan memantau masyarakatnya yang menjadi sasaran dari intervensi gizi. Ini akan memberikan hasil yang baik dalam upaya pencegahan stunting.

Salah satu desa di kabupaten Malang tepatnya di kecamatan Dau yaitu desa Sumbersekar menurut penelitian dari Ma'arif, B. dkk (2021) yang dilakukan dalam satu dusun memberikan hasil survei kejadian Stunting menunjukkan 5 dari 16 balita mengalami stunting dan faktor-faktor penyebabnya adalah pola asuh kurang baik, kurangnya asupan makanan bergizi, perilaku keluarga, lingkungan dan keadaan. Serta upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lintas sektor serta melakukan edukasi melalui penyuluhan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Eko Sasmito selaku sekretaris Desa Sumbersekar bahwasanya masalah stunting di Desa Sumbersekar termasuk dan menjadi skala prioritas, sudah masuk pada RPJM Desa dan tentunya sudah dianggarkan. Kemudian disampaikan juga bahwa pemberdayaan harus ada karena dengan itu masyarakat bisa sadar dan mau untuk hidup sehat.

Stunting ini menjadi sebuah masalah yang sangat diperhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Liin salah satu anggota PKK sekaligus guru TK pada saat diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan bahwa stunting di desa Sumbersekar kalau saat ini memang menjadi masalah yang diperhatikan. Makanya setiap anggota PKK di sini selalu ada pertemuan dan program terkait masalah stunting, dalam upaya pencegahan stunting memang perlu dilakukan, penting juga pemberdayaan masyarakat kadang sering kita PKK kerja sama dengan tenaga kesehatan.

Stunting ini akan selalu menjadi prioritas pembangunan di desa Sumbersekar mengingat anak yang lahir akan terus ada kedepannya, sehingga bagaimana menciptakan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan itu sangat penting, maka dari itu membuat masyarakat punya pengetahuan terhadap stunting dan bisa aktif dalam berpartisipasi dalam upaya kesehatan di desa Sumbersekar.

Melihat hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Liin sebagai salah satu anggota PKK yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang stunting, di setiap RT itu kami

coba komunikasikan, buat pertemuan, kadang mendatangkan pemateri dari luar agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, biar lebih menarik.

Dari fenomena, masalah, penelitian terdahulu diatas bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dan urgen sekali dilakukan di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Maka perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang stunting, menyadarkan masyarakat untuk tetap berperilaku hidup sehat, meningkatkan peran organisasi di dalam desa dalam ikut andil dalam pencegahan stunting. Sangat penting sekali sebuah pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang kesehatan di desa Sumbersekar kecamatan Dau kabupaten Malang. Oleh karenanya strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 bisa dijadikan acuan dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desanya. Kemudian diimplementasikan dengan baik sehingga efektif pada pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Melihat pemaparan fenomena dan kasus yang telah diuraikan, maka dari itu peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Implementasi Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Studi Upaya pencegahan Stunting Di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain diatas menunjukkan pentingnya sebuah implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut;

1. Bagaimana kasus stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
3. Bagaimana implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
4. Bagaimana Efektivitas implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti maka tujuan penelitian diantaranya;

1. Mendeskripsikan kasus stunting di desa Sumbersekar kecamatan Dau kabupaten Malang.
2. Mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Mendeskripsikan implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

4. Mendeskripsikan efektivitas implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Semoga dengan adanya hasil penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang menjadi sumbangsih pemikiran dari peneliti sehingga diharapkan mampu menjadi bagian dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu administrasi publik. Dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan konteks fenomena dan problem yang sama.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dan rekomendasi saran terhadap pemerintah desa Sumbersekar dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting, serta juga kepada berbagai pihak yang terlibat, lintas sektor, elemen-elemen yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan deskripsi implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar sudah berhasil dapat dilihat dari kesimpulan berikut:

1. Prevelensi stunting di Desa Sumbersekar sudah cukup rendah dengan 13,01% di bawah target nasional 14% pada 2024 sesuai RPJMN. Hal itu disebabkan oleh masalah asupan gizi. Masyarakat kurang mampu berpotensi menjadi stunting dilihat dari Pemerintah Desa Sumbersekar juga memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan gizinya.
2. Strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang meliputi: 1) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan mengatasi stunting; 2) Peningkatan kesadaran melalui pergerakan masyarakat; 3) Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat; 4) Penguatan dan advokasi kepada pemangku kepentingan; 5) Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor; 6) Peningkatan dan pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan lokal; 7) Pengintegrasian program dan kegiatan.

3. Implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Sudah terlaksana hal ini dilihat dari;
 - A. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenal dan mengatasi stunting di desa Sumbersekar dilakukan dengan Sosialisasi, penyuluhan, serta pendampingan keluarga. Hanya saja dalam sosialisasi belum masif dilakukan pada masyarakat umum sehingga tidak semua masyarakat mengenal stunting.
 - B. Peningkatan kesadaran masyarakat desa Sumbersekar melalui kegiatan-kegiatan gemar makan ikan dan kegiatan-kegiatan di posyandu. Namun kegiatan ini hanya terbatas pada sasaran spesifik seperti ibu balita.
 - C. Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat Pemerintah Desa Sumbersekar membuat kepengurusan PKK dan Kader-kader kesehatan dan memberikan penyuluhan, pelatihan serta pembinaan untuk meningkatkan kapasitasnya.
 - D. Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan melalui rembuk stunting di Desa Sumbersekar
 - E. Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor Pemerintah Desa Sumbersekar telah bermitra dengan Perguruan Tinggi, perikanan, perusahaan.
 - F. Peningkatan dan pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan berbasis kearifan lokal di Desa Sumbersekar yaitu, UKBM (usaha

kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) seperti posyandu telah dimanfaatkan dan didukung dengan sumber daya manusia dan dana swadaya masyarakat.

G. Pengintegrasian program kegiatan sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa Sumbersekar dengan membentuk kader-kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Program Pemberian makanan Tambahan (PMT)

4. Efektivitas implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam upaya pencegahan stunting di Desa sumbersekar sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat Desa Sumbersekar akan tumbuh kembang anaknya serta partisipasinya baik secara fisik dan finansial.

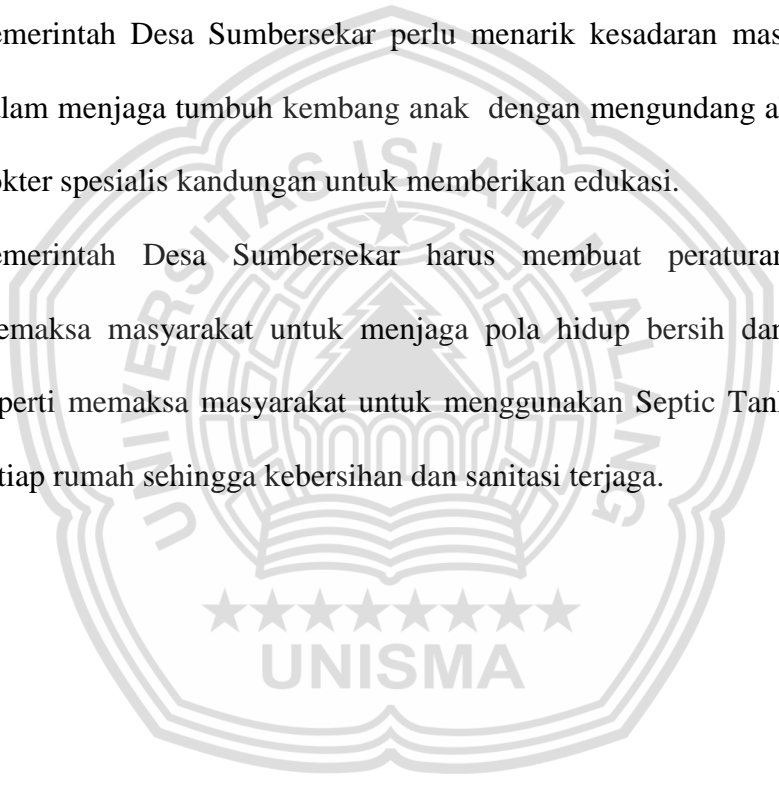
B. Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan ditemukan beberapa kekurangan walaupun implementasi strategi pemberdayaan bidang kesehatan sudah terlaksana seperti kurangnya masifnya sosialisasi dan kegiatan-kegiatan di masyarakat Desa Sumbersekar yang bertujuan mengedukasi tentang gizi sehingga sebagai saran dalam proses Implementasi strategi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Desa Sumbersekar dalam upaya pencegahan stunting:

1. Pemerintah Desa Sumbersekar diharapkan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti KUA (Kantor Urusan Agama), Tokoh Agama, pertanian, perikanan, akademisi, serta lembaga swadaya

masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan untuk membantu dalam penanganan Stunting.

2. Pemerintah Desa Sumbersekar perlu mengoptimalkan adanya gerakan yang mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya gizi, seperti festival lomba olah makanan bergizi yang bisa dilakukan baik tingkat RT, RW, Dusun bahkan satu desa.
3. Pemerintah Desa Sumbersekar perlu menarik kesadaran masyarakat dalam menjaga tumbuh kembang anak dengan mengundang ahli gizi, dokter spesialis kandungan untuk memberikan edukasi.
4. Pemerintah Desa Sumbersekar harus membuat peraturan yang memaksa masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, seperti memaksa masyarakat untuk menggunakan Septic Tank untuk setiap rumah sehingga kebersihan dan sanitasi terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamaad (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar. Syakir Media Press
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Budi, W. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Pross, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide – Stunting dan Upaya Pencegahannya*. Buku stunting dan upaya pencegahannya (p. 88). CV Mine Yogyakarta.
- Subarsono, A.G (2015). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulaeman (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan, Teori Dan Implementasi*. Cetakan ketiga (edisi revisi). Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Jurnal:

- Hasana (2020). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Ibu Dan Anak Di Puskesmas Batuyang*. Vol. 1 No. 1 (2020): *Jurnal Mentari Publika*. <http://ejournal.stiamuhammadiyahselong.ac.id>
- Irawan, D. A, (2022). *Gambaran Analisis Pembangunan Kesehatan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. Volume 3, Nomor 3, September 2022. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id>
- Khalisah, U. N., Puspaningrum, I. I., & Yuliastina, R. (2020). *Implementasi Peraturan Bupati Sumenep N0. 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep)*. *PUBLIC CORNER*, 15(2), 25–37. <https://doi.org/10.24929/fisip.v15i2.1170>
- Ma'arif, B., Syarifuddin, S., Arisanti, D., Fitria Astari, L., Guhir, A. M., Muslikh, F. A., ... Saidah, N. L. (2021). *Epmas: Edukasi dan Pengabdian Masyarakat Profil Dan Pencegahan Peningkatan Kejadian Stunting Pada Balita Di Dusun Precet, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang*. *Journal.Ukrim.Ac.Id*, 1, 1–8.

- Mudi, S. D. Turtiantoro & Erowati, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 105-117. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/35928>.
- Nugroho, M. R., Sasongko, R. N., & Kristiawan, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.1169>
- Ratoyo. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kasus stunting di Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Simplex*, 2(3), 63–74. Retrieved from <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JS/article/view/413>
- Restuastuti, T., Zahtamal, Z., Chandra, F., & Restila, R. (2017). Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), 14. <https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.2017.14-19>
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>

Dokumen Resmi Negara:

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Menteri Kesehatan No. 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Peraturan Bupati Malang No. 33 Tahun 2018 Tentang Upaya Pencegahan Stunting.

Website:

BKKBN (2021). Indonesia Cegah Stunting. <https://www.bkkbn.go.id/berita-indonesia-cegah-stunting>. Diakses tanggal 25 November 2022

Dinkes.malangkab.go.id (2022). Angka Stunting Kabupaten Malang Alami Penurunan, Perubahan Perilaku Jadi Syarat Utama. <https://dinkes.malangkab.go.id/pd/detail?title=dinkes-opd-angka-stunting-kabupaten-malang-alami-penurunan-perubahan-perilaku-jadi-syarat-utama>. Diakses tanggal 29 November 2022

- Djpb.kemenkeu.go.id (2022). Stunting, Apa Penyebab Dan Upaya Penanganannya. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data/publikasi/artikel/3012-stunting,-apa,-penyebab-dan-upaya-penanganannya.html>. Diakses tanggal 25 November 2022
- P2PTM Kemenkes RI (2018). Cegah Stunting dengan Perbaikan Pola Makan, Pola Asuh dan Sanitasi. <https://p2ptm.kemkes.go.id/post/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-asuh-dan-sanitasi>. Diakses tanggal 26 November 2022
- Radarmalang.jawapos.com (2022). Kebut Turunkan Stunting, Prevalensi Turun Jadi 8,1 Persen. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/kabupaten-malang/08/09/2022/kebut-turunkan-stunting-prevalensi-turun-jadi-81-persen/>. Diakses tanggal 29 November 2022
- Stunting.go.id (2022). Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil. <http://stunting.go.id/>. Diakses tanggal 28 November 2022
- Tempo.co (2018). Bappenas: Stunting Bisa Picu Kerugian Ekonomi 2 Persen dari PDB. <https://bisnis.tempo.co/read/1093343/bappenas-stunting-bisa-picu-kerugian-ekonomi-2-persen-dari-pdb>. Diakses Tanggal 26 November 2022

